



**LAPORAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2016 dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Masukan konstruktif dan inovatif sangat diharapkan dari semua pihak guna perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Malang, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI

Pembina Utama Muda

NIP. 19681207 198803 2 0024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2019, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang melaksanakan 36 kegiatan dari 11 program untuk mendukung pencapaian 2 sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama Dinas koperasi dan Usaha Mikro yaitu persentase Koperasi Aktif dan Persentase Pertumbuhan UMKM

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang adalah **Rp. 8.970.162.625,43 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen)** dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Bagi Hasil Tembakau). Dari total alokasi biaya tersebut dapat tersealisasi sebesar **Rp. 8.344.464.004,50 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Rupiah Lima Puluh Sen)** atau sebesar 93,02%, untuk sisa dana yang tidak terserap 6,98 % tersebut merupakan silpa dari belanja tidak langsung sebesar 5,8% dan efisiensi penggunaan dari pagu anggaran belanja langsung pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 1,18%. Sedangkan program yang anggarannya bersumber dari DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Bagi Hasil Tembakau) adalah program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dan kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 2.425.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar 27,03% dari Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan terealisasi 93,02 %.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI

4 Pembina Utama Muda

NIP. 19681207 198803 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018	19
D. Sistematika	20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis	22
1. Tujuan dan Sasaran	22
2. Kebijakan dan Program	23
B. Perjanjian Kerja	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Capaian Kinerja	27
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	28
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018	28
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	28
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan dan solusi	29
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	31
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan anggaran	31
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
B. Realisasi Anggaran	32
C. Prestasi Tahun 2019	34

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media yang menerangkan tentang kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2018. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintahan dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2017 dalam merespon Peraturan Presiden Republik Indonesia no 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensial di Wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat, guna mampu memberikan kontribusinya kepada perekonomian di Wilayah Kabupaten Malang harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya masyarakat pelaku ekonomi.

Guna melaksanakan program dimaksud serta menjaga konsistensi antara tugas, kewajiban yang diembannya, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang kepada Bupati Malang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang.
3. Meningkatkan Kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas – tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah merupakan salah satu instansi teknis Pemerintahan Kabupaten Malang yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai Dinas Teknis yang mendapatkan tugas didalam Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatannya terutama dibidang administrasi Keuangan kepada Bupati sebagai pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran yang seobjektif mungkin dengan tolok ukur atau indikator pengukuran Kinerja. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas, yang merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol, terutama dalam pencapaian hasil dan Evaluasi Kinerja.

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kebijakan teknis urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Setelah itu sesuai dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah maka Dinas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kebijakan teknis urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan akhirnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adapun tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas**

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Bidang tugasnya.

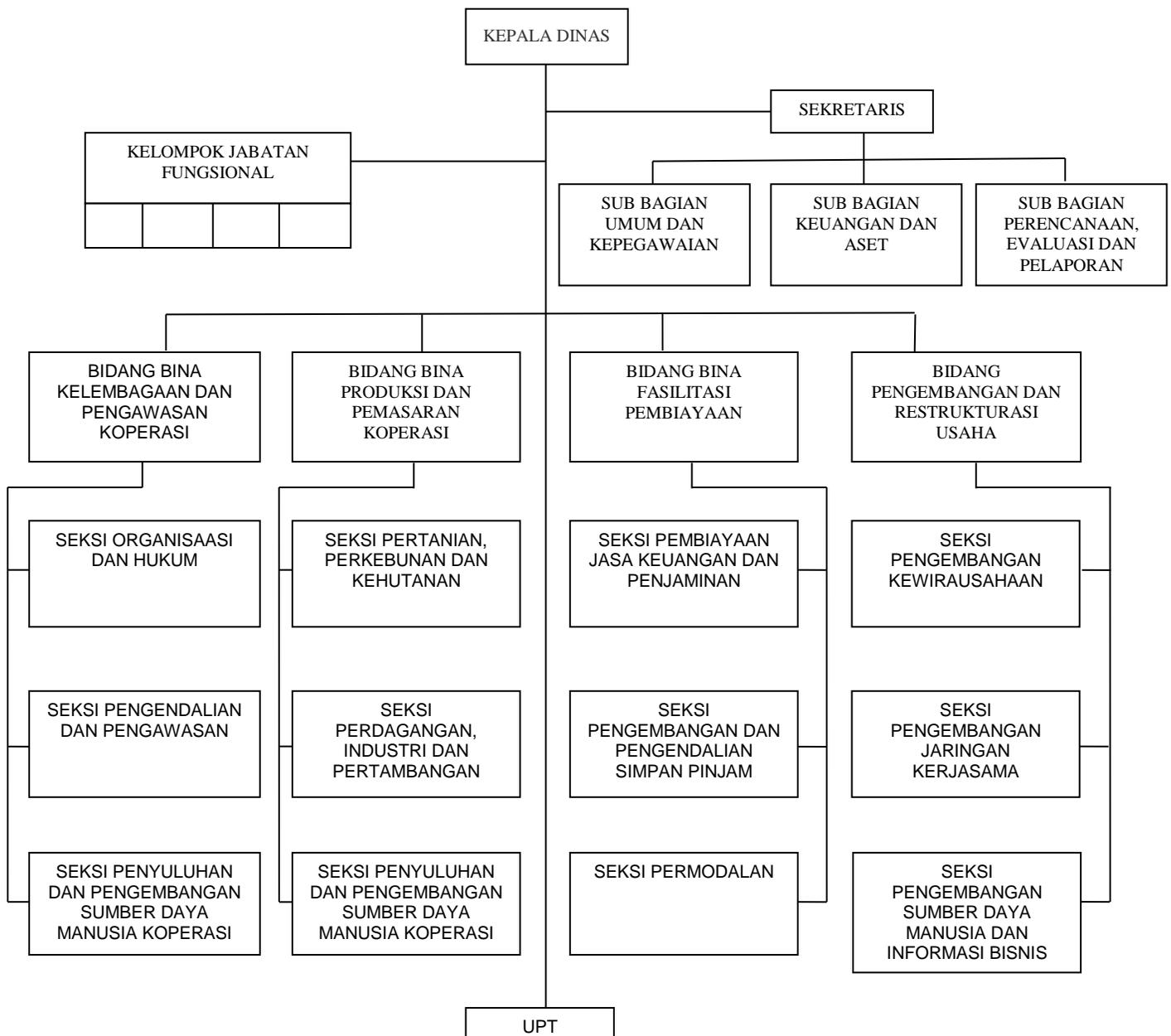
- **Fungsi**

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas.
- c. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- h. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- i. Pembinaan UPT.
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

- k. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Mikro.
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang Koperasi dan Usaha Mikro.
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



1.1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. Memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
- g. Pengekoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan evaluasi pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- e. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Dinas

1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan serta pelatihan pegawai.
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan.
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
- e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
- f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor..
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan dan aset.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas.
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas.
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas.
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas.

- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan.
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan vahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

1.3. Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan organisasi dan hukum penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan pembantuan pengaturan pencatatan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi dan Hukum.
 - b. Seksi Pengendalian dan pengawasan.
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
- Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

1.3.1. Seksi Organisasi dan Hukum

Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan penyusunan bahan pedoman pembinaan standarisasi organisasi dan tata laksana Koperasi dan Usaha Mikro.

- b. Menyiapkan dan penyusunan pelaksanaan pedoman peningkatan koperasi.
- c. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Melakukan pembinaan tentang kedudukan hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.
- e. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Usaha Mikro, Koperasi dengan badan usaha lain, penggabungan dan peleburan Koperasi.
- f. Melakukan evaluasi tentang standar pelayanan Koperasi.
- g. Membantu proses pendirian, perubahan anggaran dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi.
- h. Memproses penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Malang
- i. Memproses penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kelembagaan Koperasi.
- b. Membantu melaksanakan pengaturan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi.
- c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan perkembangan Koperasi.
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif.

- b. Menyiapkan, merumuskan dan penyusunan bahan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian.
- d. Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pengelola koperasi dan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang mendirikan koperasi.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif.
- f. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi serta peningkatan sumber daya manusia usaha mikro.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya

1.4. Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi mempunyai fungsi

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi dan usaha Mikro.
- c. Pengawasan usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- b. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
- c. Seksi Peternakan dan Perikanan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi.

1.4.1. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha Koperasi dan manajemen usaha Koperasi pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan

Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan tata cara penyertaan modal pada sektor jasa perdagangan, industri dan pertambangan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha Koperasi dan usaha Mikro di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. Seksi Peternakan dan Perikanan

Seksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang peternakan dan perikanan.
- b. Melakukan pemantapan dan pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang peternakan dan perikanan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro disektor peternakan, perikanan dan kelautan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan Simpan Pinjam, fasilitas, pembiayaan jasa keuangan dan pinjaman serta permodalan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman pengembangan di bidang usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pembinaan, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembiayaan Jasa keuangan dan Penjaminan.
- b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam.
- c. Seksi Permodalan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan.

1.5.1. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan

Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan mempunyai tugas

- a. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan bagi usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank/ non bank dengan usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembinaan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dalam rangka pengendalian kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.

- c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Melaksanakan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- e. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.3. Seksi Permodalan

Seksi Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melakukan pembinaan dan motivasi pembentukan modal sendiri maupun modal luar terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap perkuatan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro melalui modal penyertaan Pemerintahan, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya.
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha

Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pengembangan dan Restrukturasi usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknik dan pembangunan dan pengembangan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan dan usaha dan kerjasama Usaha Mikro dengan Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah, Lembaga Keuangan bank dan non bank'
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro.

Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama.
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Bisnis Usaha Mikro.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha.

1.4.1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan.
- b. Melakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan.
- c. Melakukan upaya dalam rangka pengembangan wira usaha baru.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha.

1.4.2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama

Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan kerjasama Usaha Mikro.
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembangaan, Usaha dan kerjasama Koperasi, pengusaha Mikro dan kerjasama dengan Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank/non Bank.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama Usaha Mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha..

1.4.3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Bisnis

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Bisnis mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro.
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis Usaha Mikro
- c. Melakukan pendistribusian informasi bisnis Usaha Mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha.

1.5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir

UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan sebagian unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang pelayanan pembiayaan permodalan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas :

- a. Mengelola Dana Bergulir.
- b. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- c. melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro.
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di UPT Pengelola Dana Bergulir.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan UPT Pengelola Dana Bergulir.

1.5.1. Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir

Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas :

- a. Memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat di capai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

- b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- c. melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- b. menyelenggarakan, perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPT Pengelola Dana Bergulir.
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelola Dana Bergulir.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang untuk Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 54 orang dengan rincian 31 berstatus PNS (57%) dan 23 orang non PNS (43%) dari total tersebut 33 orang (berjenis kelamin laki-laki (61%) dan 21 Berjenis kelamin perempuan (39%), Dengan sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berpendidikan terakhir sarjana (SI) menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	12	Pembina Utama Muda	1	II - b	1
S1	28	Pembina Tingkat I	-	III - a	1
Diploma	2	Pembina	14	III - b	4
SMA/SMK	10	Penata Tingkat I	8	IV - a	16
SMP	2	Penata	3	IV-b	1
		Penata Muda Tk. I	2		
		Penata Muda	2		
		Pengatur Tk. I	-		
		Pengatur	-		
		Pengatur Muda Tk. I	-		
		Pengatur Muda	1		
		Juru Tk. I	-		
Jumlah	54		31		23

b. Sarana dan Prasarana

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki 3 Gedung yaitu Gedung di Jalan Trunojoyo Kav. 1 Kepanjen Malang yang dijadikan perkantoran pusat kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dengan luas tanah bangunan 1.600 m² yang terdiri 2 lantai @800 M2, Gedung Griya KUMKM yang ada di Bedali Kecamatan Lawang yang dijadikan sebagai tempat promosi produk UMKM dengan luas 1.067,36 m² dan Gedung PLUT-KUMKM dengan luas tanah dan bangunan 1.000 m² yang ada di Jalan Trunojoyo Kepanjen Malang, Ketiga Gedung tersebut dalam kondisi baik.

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
1	Portable Water Pump	2006	1	-	-	1
2	Mobil	1992-2014	8	1	1	6
3	Sepeda Motor	1988-2015	32	17	-	15
4	Mesin Ketik Manual Portable	1987-1998	5	1	-	4
5	Mesin Ketik Manual Langewagon	2008-2017	7	-	-	7
6	Mesin Ketik Elektronik	2010	2	-	-	2
7	Mesin Hitung Manual	2011	1	-	-	1
8	Mesin Calculator	2017	10	-	-	10
9	Lemari besi/metal	2005-2019	8	-	-	8
10	Rak Kayu	2012	2	-	-	2
11	Filling besi	1981-2018	27	2	-	25
12	Brankas	1982-2017	5	-	-	5
13	Lemari Kaca	1995-2005	9	-	-	9
14	Papan Visual/Papan Nama	2002-2017	12	-	-	12
15	Papan Pengumuman	2017	4	-	-	4
16	White Board	2017	3	-	-	3
17	Peta	1998-2000	2	-	-	2
18	Mesin Absensi	2017	1	-	-	1
19	Overhead Projector	2009	1	-	-	1
20	Display	2011	1	-	-	1
21	Lemari Kayu	1982-2017	42	2	-	40
22	Rak Kayu	2017	1	-	-	1
23	Meja Kayu/Rotan	1995-2012	10	-	-	10
24	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1998-2002	5	-	-	5
25	Sice	2002	1	-	-	1
26	Meja Rapat	2000-2017	16	-	-	16
24	Meja Resepsionis	2010	1	-	-	1
25	Kursi Rapat	2009-2017	250	-	-	250
26	Kursi Tamu	1999-2017	23	-	-	23
27	Kursi Putar	1998-2000	3	-	-	3
28	Kursi Lipat	1998-2017	97	-	-	97
29	Meja ½ biro	2017	13	-	-	13
30	Sofa	2017	4	-	-	4
31	Mesin Pemotong Rumput	2015	1	-	-	1
32	Lemari Es	2011-2017	3	-	-	3
33	AC Unit	1995-2018	37	-	-	37
34	Kipas Angin	1980-2017	5	-	-	5
35	Alat dapur lainnya	2017	2	-	-	2
36	Televisi	2011-2017	6	-	-	6
37	Loudspeaker	2006	1	1	-	-
38	Sound System	2010-2017	4	-	-	4
39	Wireless	2008-2011	2	-	-	2
40	Microphone Table Stand	2017	2	-	-	2
41	Camera Video	2018	2	-	-	2
42	Camera Film	2015	1	-	-	1
43	Tustel	2010-2017	4	-	-	4
44	Alat Hiasan	2009-2017	101	-	-	101

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
46	Gambar Presiden/wakil Presiden	2000-2017	3	-	-	3
47	Mimbar/podium	2012	1	-	-	1
48	Handy Cam	2010	1	-	-	1
49	Alat Rumah Lain-lain	2012-2017	25	-	-	25
50	Tabung Pemadam Api	2006	2	-	-	2
51	Internet	2009	1	-	-	1
52	Alat Komputer Lain-lain	2011	1	-	-	1
53	PC.unit	1999-2019	61	-	-	61
54	Laptop	2015-2019	10	-	-	10
55	Note Book	2008-2014	9	-	-	9
56	Komputer Lain-lain	2009	1	-	-	1
57	Printer	2015-2019	25	-	-	25
58	Scanner	2018	1	-	-	1
59	Mini Komputer lain-lain	2017	20	-	-	20
60	CPU	2010	1	-	-	1
61	Printer	2008-2014	32	-	-	32
62	Scanner	2010-2011	2	-	-	2
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2002-2006	2	-	-	2
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2007	7	-	-	7
65	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1998-2017	19	-	-	19
66	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1995-2017	91	-	-	85
67	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2018	1	-	-	1
68	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2018	2	-	-	2
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2006-2017	8	-	-	8
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1997-2018	15	-	-	15
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1990-2019	37	3	-	34
72	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1997-2017	57	-	-	57
73	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	2010	1	-	-	1
74	Buffet Kaca	2000	1	-	-	1
75	Proyektor + Attachment	2011-2017	5	-	-	5
76	Microphone/wireless Mic	2015	1	-	-	1
77	Telephone (pabx)	1995	1	-	-	1
78	Pesawat Telephone	2000-2017	4	-	-	4
79	Facsimile	2014-2017	2	-	-	2
80	Mixer	2015	1	-	-	1
81	TV Monitor	2019	1	-	-	1
82	Pompa Airasil	2015	1	-	-	1
83	Kabel listrik	2015	1	-	-	1

Sarana prasarana kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya.

2. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
		2018	2018
1	Persentase Koperasi Aktif	80 %	99,2%
2	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,5%	0,56%

Indikator Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2018 yang ditargetkan 80%, dengan realisasi sebesar 99,2%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kop. Aktif Tahun 2018} \times 100\%}{\sum \text{Kop. Tahun 2018}} = \frac{1.283}{1.293} \times 100\% = 99,2\%$$

Indikator tersebut mengalami peningkatan 19,2% dari yang ditargetkan atau mencapai 124% yaitu jumlah Koperasi Aktif tahun 2018 (1.283) dibagi jumlah koperasi tahun 2018 (1.293).

Indikator persentase pertumbuhan UMKM tahun 2018 yang ditargetkan 0,5 %, dengan realisasi sebesar 0,56%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{UMKM Tahun 2018} - \sum \text{UMKM Tahun 2017} \times 100\%}{\sum \text{UMKM Tahun 2017}} = \frac{423.350 - 420.995}{420.995} \times 100\% = 0,56\%$$

Indikator tersebut mengalami peningkatan 0,06% dari yang ditargetkan atau mencapai 112% yaitu jumlah UMKM tahun 2018 (423.350) dikurangi jumlah UMKM tahun 2017 (420.995) dibagi jumlah jumlah UMKM tahun 2017 (418.860),

Berdasarkan Data tersebut, Diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan atau kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksanaan kegiatan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mensinergikan kegiatan pelaksanaan kegiatan antar bidang, BLUD dan Sekretariat agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya sekaligus

diupayakan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

- b. Peningkatan kuantitas dengan cara memanfaatkan dan memberdayakan tenaga kontrak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan sebagainya.
- c. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian

Dalam hak pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

D. SISTEMATIKA

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018
- D. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2019

BAB IV : PENUTUP

Lampiran – Lampiran

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang yang dibuat secara bersama – sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan Strategis bersifat adaptif terhadap perubahan – perubahan, baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

1. Tujuan dan Sasaran**a. Tujuan**

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran yang dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (kapan harus dicapai), tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI / Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

- *Idealistik* Mengandung nilai- nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- *Jangkauan ke depan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi*
- *Abstrak* Belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan supremasi hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Menumbuh kembangkan kelembagaan, manajemen Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi Koperasi, Usaha Mikro untuk memperluas akses pasar.
5. Meningkatkan akses permodalan Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pemanfaatan sumber daya produktif.
6. Berkembangnya sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

7. Menghasilkan pola kerjasama kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pemerintah, swasta, BUMN/BUMD/Perbankan maupun Lembaga Keuangan Lainnya.
8. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

b. Sasaran

Adapun Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas dan nilai ekspor produk usaha Mikro.
2. Berkembangnya Usaha Mikro di Pedesaan atau di Daerah tertinggal dan Kantong-Kantong kemiskinan.
3. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Organisasi Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi.
4. Kenaikan Omzet dan Asset Koperasi.
5. Kenaikan Jumlah KSP/ USP yang berpredikat sehat.
6. Kenaikan Jumlah Koperasi aktif yang melakukan Rapat Anggota Tahunan.

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana Program, sasaran, dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

2. Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro di atas, Dinas Koperasi dan usaha Mikro menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Usaha Mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh kembangkan Wirausaha Baru berkeunggulan Prima untuk mendorong pertumbuhan peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
3. Mengembangkan Koperasi, dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.
4. Membangun Tatanan Kelembagaan dan Organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan Koperasi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang – Bidang dan Bagian Sekretariat guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal – hal yang menjadi landasan Penetapan Program Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Sekretariat

- Program Pelayanan administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

- Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.

3. Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi

- Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro.

4. Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

- Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

5. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan

- Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

6. UPT Pengelola Dana Bergulir

- Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro

B. Perjanjian Kerja

Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7 %	3 Program / 9 Kegiatan	1.043.979.800,00
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05%	3 Program / 5 Kegiatan	2.994.246.463,43

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - b. Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan latihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
 - b. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - c. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
7. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Mikro
 - a. Penguatan Manajemen Usaha Dan Daya Saing Produk Koperasi Dan Usaha Mikro
 - b. Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Melalui Pemeran Tingkat Regional Dan Nasional
 - c. Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis Serta Diversifikasi Usaha Produk Koperasi
8. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Dan Usaha Mikro
 - a. Koordinasi Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi
 - b. Penataan Menejemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - c. Penilaian Kesehatan Koperasi
9. Program Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha
 - a. Pengembangan Jaringan Kerja Sama
 - b. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - a. Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat
 - b. Fasilitasi Promosi Bagi usaha Mandiri Masyarakat
11. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Peningkatan Permodalan KUMKM melalui UPT Pengelola Dana Bergulir

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**1. CAPAIAN KINERJA**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kabupaten Malang yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan tugas-tugas pokok lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga sampai saat ini pelayanan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro telah dilakukan dengan baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun yang menerima layanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu pada norma dan peraturan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro menuai hasil diantaranya perkembangan Koperasi di Kabupaten Malang semakin meningkat hal ini suatu tantangan yang berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pembinaan agar organisasi koperasi berkualitas dan usaha koperasi berkembang sehingga peran koperasi terhadap pertumbuhan perekonomian Nasional khususnya di Kabupaten Malang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya wirausaha baru maupun usaha mikro di Kabupaten Malang maka pembinaan serta pendampingan baik dalam hal Manajemen usaha, ketrampilan, permodalan maupun pemasaran masih perlu terus digalakkan agar wujud kemandirian Masyarakat berupa sikap yang memiliki semangat entrepreneurship bisa terus dikembangkan sehingga semakin dapat meningkatkan kualitas produksinya untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7 %	2,66%	104%
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05%	0,14%	280%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI	
				Th. 2018 (%)	Th. 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7 %	-	2,66%
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05%	-	0,14%

Catatan : Indikator Kinerja Utama tahun 2018 dan tahun 2019 tidak sama, jadi tidak dapat dibandingkan.

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	REALISASI Th. 2018 (%)	TINGKAT KEMAJUAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	1	2,66	37,6
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,15	0,14	93,3

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7	2,66	101,4

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Formulasi perhitungannya adalah jumlah Koperasi Rehabilitasi tahun (n) dibagi jumlah Koperasi tahun (n), dari formulasi tersebut didapat 35 dibagi 1.316 dikali 100 sehingga diperoleh realisasi kinerja sejumlah 2,66%

1. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab pada indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif antara lain,
 - a. Pemberian Bimbingan teknis agar kualitas Sumber Daya Manusia pengurus Koperasi meningkat.
 - b. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi melalui Dana Bergulir dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank.
 - c. Memberikan pembinaan dan pemahaman kepada anggota Koperasi tentang arti pentingnya koperasi (Sadar Koperasi).

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemberian Bimbingan Teknis bagi Koperasi Perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara terus menerus.
- b. Perlu adanya Peningkatan permodalan dari pemerintah daerah dan pemerintah Pusat dengan cara memanfaatkan dana bergulir secara maksimal.
- c. Pemberian pembinaan tentang sadar koperasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah berkoperasi tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang belum berkoperasi.

Dalam hal pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05	0,14	280

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Formulasi perhitungannya adalah jumlah Usaha mikro kecil yang mendapatkan legalitas usaha tahun (n) dibagi jumlah UMKM tahun (n), dari formulasi tersebut didapat 613 dibagi 423.350 dikali 100 sehingga diperoleh realisasi kinerja sejumlah 0,56%

2. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab pada indikator kinerja Persentase Pertumbuhan UMKM antara lain:
 - a. Memberikan Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Usaha Mikro melalui PLUT-KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional serta adanya website khusus yang menampilkan profil dan produk Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
 - b. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan serta menumbuhkan Wirausaha baru.
 - c. Memberikan pelatihan-pelatihan yang berbasis IPTEK dan Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan perluasan akses usaha melalui Pusat layanan usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah (PLUT-KUMKM).
- b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang kewirausahaan.
- c. Pemberian pelatihan berbasis Iptek dan dalam pelatihan Dinas koperasi dan Usaha Mikro harus terus menerus berinovasi.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.4

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN (%)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	1.043.979.800,00	11,64
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	2.994.246.463,43	33,38

3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7	2,66	101,4	1.043.979.800,00	1.024.399.750,00	11,64
	Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05	0,14	280	2.994.246.463,43	2.959.182.317,00	33,38

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	101,4	11,64	0,99
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	280	33,38	0,35

B. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN	360.000.000,00	364.626.225,29	101,29
BELANJA	8.970.162.625,43	8.344.464.004,50	93,02
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.725.298.962,00	3.201.629.248,51	85,94
Gaji dan Tunjangan	2.652.392.750,00	2.301.373.782,00	86,77
Tambahan Penghasilan	1.072.906.212,00	900.255.466,51	83,91
BELANJA LANGSUNG	5.244.863.663,43	5.142.834.755,99	98,05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	903.294.350,00	869.108.988,99	96,22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.830.000,00	2.825.595,00	99,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	47.835.459,00	72,48
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	465.451.200,00	450.712.334,99	96,83
Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.875.650,00	83.030.000,00	98,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.829.000,00	58.557.900,00	99,54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.417.200,00	6.417.200,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	33.659.300,00	33.498.500,00	99,52
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	93.400.000,00	93.400.000,00	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	88.560.000,00	88.560.000,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.513.050,00	223.033.700,00	95,51
Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	43.508.650,00	36.199.000,00	83,20
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.551.000,00	11.551.000,00	100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.950.000,00	31.800.000,00	99,53
Pengadaan Mebeleur	57.972.000,00	57.684.000,00	99,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	46.981.400,00	46.981.400,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.220.000,00	29.488.300,00	91,52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.330.000,00	9.330.000,00	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.750.000,00	39.690.000,00	99,85
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	39.750.000,00	39.690.000,00	99,85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.800.000,00	5.140.000,00	65,90
Pendidikan dan latihan Formal	7.800.000,00	5.140.000,00	65,90
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.280.000,00	22.280.000,00	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.970.000,00	16.970.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.310.000,00	5.310.000,00	100,00
Program Peningkatan Kelembagaan dan pengawasan Koperasi	661.530.700,00	641.950.700,00	97,04
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	470.000.000,00	450.420.000,00	95,83
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	133.985.300,00	133.985.300,00	100,00
Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	57.545.400,00	57.545.400,00	100,00
Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Mikro	235.726.000,00	235.726.000,00	100,00
Penguatan Manajemen Usaha Dan Daya Saing Produk Koperasi Dan Usaha Mikro	49.992.000,00	49.992.000,00	100,00
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Melalui Pemeran Tingkat Regional Dan Nasional	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
Pengembangan Inkubakator Teknologi Dan Bisnis Serta Diversifikasi Usaha Produk Koperasi	60.734.000,00	60.734.000,00	100,00
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Dan Usaha Mikro	177.000.000,00	170.650.000,00	96,41
Koordinasi Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Penataan Menejemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	152.000.000,00	145.650.000,00	95,82
Penilaian Kesehatan Koperasi	146.723.100,00	146.723.050,00	100,00
Program Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha	45.217.300,00	45.217.300,00	100,00
Pengembangan Jaringan Kerja Sama	61.504.000,00	61.504.000,00	100,00
Pengembangan Informasi Bisnis	40.001.800,00	40.001.750,00	100,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.425.000.000,00	2.425.000.000,00	100,00
Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat	1.409.280.000,00	1.409.280.000,00	100,00
Fasilitasi Promosi Bagi usaha Mandiri Masyarakat	1.015.720.000,00	1.015.720.000,00	100,00
Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	392.246.463,43	363.532.317,00	92,68
Peningkatan Permodalan KUMKM melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	392.246.463,43	363.532.317,00	92,68
JUMLAH	8.970.162.625,43	8.344.464.004,50	93,02

C. PRESTASI TAHUN 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT		DISERAHKAN OLEH / PENYELENGGARA	SKPD / YANG MENERIMA
		NASIONAL	PROVINSI		
1	2	3	4	6	7
1	Penghargaan Bakti Koperasi	11 Juli 2019	-	Menteri Koperasi dan UKM RI	Koppontern Hasanul
2	Penghargaan UKM Berprestasi Kategori Export	-	6 Agustus 2019	Menteri Koperasi dan UKM RI	CV Pelangi
3	Penghargaan UKM Wirausaha Muda Kategori Pengusaha Muda	-	6 Agustus 2019	Menteri Koperasi dan UKM RI	CV Bana Food
4	Juara 2 Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen	-	6 Agustus 2019	Gubernur Jawa Timur	KUD Pakis
5	Juara 3 Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen	-	6 Agustus 2019	Gubernur Jawa Timur	KOP SAE Pujon
6	Juara 2 Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Pemasaran	-	6 Agustus 2019	Gubernur Jawa Timur	KPRI Setia

Berangkat dari RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Malang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka – angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi yang sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going proses sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar – benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak perfomansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi – fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2019 merupakan bentuk pertanggung jawaban, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas koperasi dan Usaha Mikro, sekaligus sangat penting sebagai bahan pengambil keputusan (Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi) dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dengan Melaksanakan 11 Program yang telah disepakati yang terdiri dari 36 kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dapat dicapai, setelah dievaluasi dengan memperhatikan data masukan laporan aktivitas internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, hasil yang diperoleh evaluasi kinerja akhir program adalah Sangat Baik (100 %)

Berdasarkan evaluasi kinerja akhir, yang perlu diperhatikan didalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang yaitu dengan melaksanakan Rencana Strategis yang telah ditetapkan secara konsisten dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI

Pembina Utama Muda
NIP. 19681207 198803 2 002

LAMPIRAN

**TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Stabilisasi Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola dan persentase kinerja aparatur yang dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	721.121.296		100 %	964.528.800		100 %	1.099.585.400		100 %	1.213.745.800		100 %	1.339.245.800		100 %	5.338.227.096	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	173.015.000	APBD Kabupaten	4500 Buah	5.050.000	APBD Kabupaten	4500 Buah	8.050.000	APBD Kabupaten	4500 Buah	11.050.000	APBD Kabupaten	4500 Buah	14.050.000	APBD Kabupaten	13500 Buah	211.215.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	51.188.196	APBD Kabupaten	12 Bulan	66.000.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	71.000.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	76.000.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	81.000.000	APBD Kabupaten	36 Bulan	345.188.196	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	54.825.000	APBD Kabupaten	144 OB	467.913.000	APBD Kabupaten	204 OB	517.913.000	APBD Kabupaten	204 OB	567.913.000	APBD Kabupaten	204 OB	617.913.000	APBD Kabupaten	612 OB	2.226.477.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	45.600.000	APBD Kabupaten	0 OB	0	APBD Kabupaten	0 OB	0	APBD Kabupaten	0 OB	0	APBD Kabupaten	0 OB	0	APBD Kabupaten	0 OB	45.600.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 Jenis	63.200.500	APBD Kabupaten	63 Jenis	86.564.000	APBD Kabupaten	70 Jenis	91.665.500	APBD Kabupaten	70 Jenis	96.420.100	APBD Kabupaten	70 Jenis	101.420.100	APBD Kabupaten	210 Jenis	439.270.200	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	46.573.800	APBD Kabupaten	12 Jenis	62.544.800	APBD Kabupaten	14 Jenis	67.632.900	APBD Kabupaten	14 Jenis	72.314.700	APBD Kabupaten	14 Jenis	77.314.700	APBD Kabupaten	42 Jenis	326.380.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	8.574.100	APBD Kabupaten	10 Jenis	8.570.000	APBD Kabupaten	10 Jenis	10.910.000	APBD Kabupaten	10 Jenis	12.405.000	APBD Kabupaten	10 Jenis	14.405.000	APBD Kabupaten	30 Jenis	54.864.100	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.880.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	2.940.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	3.510.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	4.000.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	4.500.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	17.830.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	11.328.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	11.328.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	15.540.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	20.630.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	25.630.000	APBD Kabupaten	6 Jenis	84.456.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5001 HOK	80.657.500	APBD Kabupaten	3183 HOK	64.268.000	APBD Kabupaten	5000 HOK	84.464.000	APBD Kabupaten	5000 HOK	94.228.000	APBD Kabupaten	5000 HOK	114.228.000	APBD Kabupaten	15000 HOK	437.845.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	85.924.400	APBD Kabupaten	35 HOK	98.226.000	APBD Kabupaten	40 HOK	118.800.000	APBD Kabupaten	40 HOK	138.700.000	APBD Kabupaten	40 HOK	158.700.000	APBD Kabupaten	120 HOK	600.350.400	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	267 HOK	97.355.000	APBD Kabupaten	275 HOK	91.125.000	APBD Kabupaten	275 HOK	110.100.000	APBD Kabupaten	275 HOK	120.085.000	APBD Kabupaten	275 HOK	130.085.000	APBD Kabupaten	825 HOK	548.750.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	189.054.304		100 %	215.958.500		100 %	550.433.800		100 %	385.592.190		100 %	721.523.800		100 %	2.062.562.594	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	225.000.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	275.000.000	APBD Kabupaten	2 Unit	500.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	19.000.004	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	2 Unit	40.000.000	APBD Kabupaten	2 Unit	45.000.000	APBD Kabupaten	2 Unit	50.000.000	APBD Kabupaten	6 Unit	154.000.004	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	12.068.800	APBD Kabupaten	2 Jenis	21.305.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	30.068.800	APBD Kabupaten	4 Jenis	41.305.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	52.068.800	APBD Kabupaten	11 Jenis	156.816.400	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					15. Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	28.312.500	APBD Kabupaten	3 Jenis	34.343.500	APBD Kabupaten	4 Jenis	45.000.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	60.000.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	75.000.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	242.656.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					16. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	4 Jenis	55.000.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	65.000.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	75.000.000	APBD Kabupaten	4 Jenis	85.000.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	280.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Jenis	58.478.000	APBD Kabupaten	24 Jenis	52.205.000	APBD Kabupaten	27 Jenis	68.500.000	APBD Kabupaten	27 Jenis	75.000.000	APBD Kabupaten	27 Jenis	83.500.000	APBD Kabupaten	81 Jenis	337.683.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	55.200.000	APBD Kabupaten	28 Unit	38.650.000	APBD Kabupaten	28 Unit	46.110.000	APBD Kabupaten	28 Unit	51.532.190	APBD Kabupaten	28 Unit	56.450.000	APBD Kabupaten	84 Unit	247.942.190	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26		
					19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	12.755.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	14.455.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	20.755.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	22.755.000	APBD Kabupaten	5 Jenis	24.505.000	APBD Kabupaten	15 Jenis	95.225.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	3.240.000	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	2 Jenis	10.000.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	15.000.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	20.000.000	APBD Kabupaten	6 Jenis	48.240.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	27.860.000		100 %	0		100 %	35.300.000		100 %	30.800.000		100 %	40.300.000		100 %	134.260.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					21. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	1 Unit	5.500.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	6.500.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	7.500.000	APBD Kabupaten	2 Unit	19.500.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	22.360.000	APBD Kabupaten	0 Stel	0	APBD Kabupaten	60 Stel	28.800.000	APBD Kabupaten	60 Stel	30.800.000	APBD Kabupaten	60 Stel	32.800.000	APBD Kabupaten	180 Stel	114.760.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	6.000.000		100 %	7.200.000		100 %	8.000.000		100 %	9.000.000		100 %	10.000.000		100 %	40.200.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					23. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 Orang	6.000.000	APBD Kabupaten	15 Orang	7.200.000	APBD Kabupaten	15 Orang	8.000.000	APBD Kabupaten	15 Orang	9.000.000	APBD Kabupaten	15 Orang	10.000.000	APBD Kabupaten	45 Orang	40.200.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha mikro
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	12.564.000		100 %	19.939.000		100 %	28.564.000		100 %	35.564.000		100 %	42.720.000		100 %	139.351.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	10.365.000	APBD Kabupaten	1 Buku	16.440.000	APBD Kabupaten	1 Buku	20.365.000	APBD Kabupaten	1 Buku	25.365.000	APBD Kabupaten	1 Buku	30.465.000	APBD Kabupaten	3 Buku	103.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	2.199.000	APBD Kabupaten	1 Buku	3.499.000	APBD Kabupaten	1 Buku	8.199.000	APBD Kabupaten	1 Buku	10.199.000	APBD Kabupaten	1 Buku	12.255.000	APBD Kabupaten	3 Buku	36.351.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Meningkatnya usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	VI. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	0 %	0		100 %	191.560.400		100 %	204.560.150		100 %	214.457.215		100 %	229.450.800		100 %	840.028.565	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita	0	APBD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	65.564.000	APBD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	68.842.200	APBD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	72.284.500	APBD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	79.513.000	APBD Kabupaten	420 Koperasi Wanita	286.203.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	0 Orang	0	APBD Kabupaten	110 Orang	16.144.000	APBD Kabupaten	110 Orang	17.758.000	DAK	110 Orang	18.646.000	DAK	110 Orang	19.578.000	DAK	330 Orang	72.126.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					27. Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	52.307.000	APBD Kabupaten	100 Orang	57.537.700	APBD Kabupaten	100 Orang	60.414.000	APBD Kabupaten	100 Orang	63.000.000	APBD Kabupaten	300 Orang	233.258.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					28. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	5 Koperasi	26.046.400	APBD Kabupaten	5 Koperasi	27.348.300	APBD Kabupaten	5 Koperasi	28.715.715	APBD Kabupaten	5 Koperasi	31.587.000	APBD Kabupaten	15 Koperasi	113.697.415	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	50 Koperasi	31.499.000	APBD Kabupaten	50 Koperasi	33.073.950	APBD Kabupaten	50 Koperasi	34.397.000	APBD Kabupaten	50 Koperasi	35.772.800	APBD Kabupaten	150 Koperasi	134.742.750	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					VII. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	0 %	0		100 %	235.734.000		100 %	335.000.000		100 %	410.000.000		100 %	460.000.000		100 %	1.440.734.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					29. Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	80 Koperasi	50.000.000	APBD Kabupaten	100 Koperasi	75.000.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	100.000.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	125.000.000	APBD Kabupaten	340 Koperasi	350.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					30. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	0 Koperasi/UMK	0	APBD Kabupaten	55 Koperasi/UMK	125.000.000	APBD Kabupaten	60 Koperasi/UMK	170.000.000	APBD Kabupaten	60 Koperasi/UMK	200.000.000	APBD Kabupaten	60 Koperasi/UMK	210.000.000	APBD Kabupaten	180 Koperasi/UMK	705.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					31. Pembinaan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	60.734.000	APBD Kabupaten	120 Orang	90.000.000	APBD Kabupaten	150 Orang	110.000.000	APBD Kabupaten	150 Orang	125.000.000	APBD Kabupaten	420 Orang	385.734.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1					VIII. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	0 %	0		100 %	146.723.300		100 %	533.148.950		100 %	558.148.950		100 %	583.148.950		100 %	1.821.170.150	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					32. Koordinasi dan Penguatan Akses Pemmodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses pemmodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	97 Koperasi	45.217.300	APBD Kabupaten	313 Koperasi	212.254.500	APBD Kabupaten	313 Koperasi	217.254.500	APBD Kabupaten	313 Koperasi	222.254.500	APBD Kabupaten	939 Koperasi	696.980.800	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					33. Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	120 Koperasi	61.504.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	110.450.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	120.450.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	130.450.000	APBD Kabupaten	360 Koperasi	422.854.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					34. Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	80 Koperasi	40.002.000	APBD Kabupaten	135 Koperasi	210.444.450	APBD Kabupaten	135 Koperasi	220.444.450	APBD Kabupaten	135 Koperasi	230.444.450	APBD Kabupaten	405 Koperasi	701.335.350	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					IX. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase fasilitas pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100 %	21.052.500		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	21.052.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					35. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi	27 Koperasi/KUD	21.052.500	APBD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	21.052.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					36. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembaku	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembaku	0	0	DBHCHT	0	0	DBHCHT	0	0	DBHCHT	0	0	DBHCHT	0	0	DBHCHT	0	0	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					X. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100 %	1.631.430.000		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	1.631.430.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					37. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Koperasi	121.430.000	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	121.430.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					38. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	2500 Orang	1.510.000.000	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	1.510.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					XI. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100 %	315.065.000		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	315.065.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					39. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoprasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	140 Koperasi Wanita	82.415.000	APBD Kabupaten	0 Koperasi Wanita	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi Wanita	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi Wanita	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi Wanita	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi Wanita	82.415.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					40. Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	142 KSPPS,Koperasi dan KEP	150.000.000	DBHCHT	0 KSPPS,Koperasi dan KEP	0	DBHCHT	0 KSPPS,Koperasi dan KEP	0	DBHCHT	0 KSPPS,Koperasi dan KEP	0	DBHCHT	0 KSPPS,Koperasi dan KEP	0	DBHCHT	0 KSPPS,Koperasi dan KEP	150.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					41. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	42.230.000	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	42.230.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					42. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	180 Koperasi	40.420.000	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	40.420.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	0 %	0		100 %	127.000.000		100 %	947.500.000		100 %	1.102.500.000		100 %	1.267.125.000		100 %	3.444.125.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					43. Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan pemmodalan	0 Orang	0	APBD Kabupaten	80 Orang	25.000.000	APBD Kabupaten	150 Orang	32.500.000	APBD Kabupaten	150 Orang	35.250.000	APBD Kabupaten	150 Orang	38.662.500	APBD Kabupaten	450 Orang	131.412.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	2 Kecamatan	140.000.000	APBD Kabupaten	2 Kecamatan	170.000.000	APBD Kabupaten	2 Kecamatan	200.000.000	APBD Kabupaten	6 Kecamatan	510.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses pemmodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	15 Kecamatan	150.000.000	APBD Kabupaten	15 Kecamatan	170.250.000	APBD Kabupaten	15 Kecamatan	200.212.500	APBD Kabupaten	45 Kecamatan	520.462.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					44. Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	100.000.000	APBD Kabupaten	100 Orang	120.500.000	APBD Kabupaten	100 Orang	140.625.000	APBD Kabupaten	300 Orang	361.125.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	75 Orang	75.000.000	APBD Kabupaten	75 Orang	85.500.000	APBD Kabupaten	75 Orang	95.375.000	APBD Kabupaten	225 Orang	255.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021								
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.			Sbr. Dana	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	75 Orang	75.000.000	APBD Kabupaten	75 Orang	85.500.000	APBD Kabupaten	75 Orang	95.375.000	APBD Kabupaten	225 Orang	255.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					45. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitas promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	0 Pameran	0	APBD Kabupaten	1 Pameran	102.000.000	APBD Kabupaten	0 Pameran	0	APBD Kabupaten	0 Pameran	0	APBD Kabupaten	0 Pameran	0	APBD Kabupaten	0 Pameran	102.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					46. Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	0 Kali	0	APBD Kabupaten	0 Kali	0	APBD Kabupaten	2 Kali	200.000.000	APBD Kabupaten	2 Kali	220.000.000	APBD Kabupaten	2 Kali	241.000.000	APBD Kabupaten	6 Kali	661.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	0 Kali	0	APBD Kabupaten	0 Kali	0	APBD Kabupaten	1 Kali	100.000.000	APBD Kabupaten	1 Kali	120.000.000	APBD Kabupaten	1 Kali	140.500.000	APBD Kabupaten	3 Kali	360.500.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	75.000.000	APBD Kabupaten	100 Orang	95.500.000	APBD Kabupaten	100 Orang	115.375.000	APBD Kabupaten	300 Orang	285.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					XIII. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	0 %	0		100 %	325.000.000		100 %	330.000.000		100 %	335.000.000		100 %	340.000.000		100 %	1.330.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					47. Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	125 KUMKM	325.000.000	APBD Kabupaten	125 KUMKM	330.000.000	APBD Kabupaten	125 KUMKM	335.000.000	APBD Kabupaten	125 KUMKM	340.000.000	APBD Kabupaten	375 KUMKM	1.330.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					XIV. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	0 %	0		100 %	2.425.000.000		100 %	2.425.000.000		100 %	2.546.250.000		100 %	2.673.562.500		100 %	10.069.812.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					48. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan, peningkatan kualitas dan manajemen usaha	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	300 Orang	455.000.000	DBHCHT	300 Orang	477.750.000	DBHCHT	300 Orang	501.637.500	DBHCHT	900 Orang	1.434.387.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	0 Orang	0	DBHCHT	3275 Orang	1.969.783.000	DBHCHT	2500 Orang	1.550.000.000	DBHCHT	2500 Orang	1.627.500.000	DBHCHT	2500 Orang	1.708.875.000	DBHCHT	7500 Orang	6.856.158.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					49. Fasilitas Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	0 Kali	0	DBHCHT	0 Kali	0	DBHCHT	6 Kali	300.000.000	DBHCHT	6 Kali	315.000.000	DBHCHT	6 Kali	330.750.000	DBHCHT	18 Kali	945.750.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitas pameran lokal dan nasional	0 UMK	0	APBD Kabupaten	35 UMK	455.217.000	DBHCHT	0 UMK	0	APBD Kabupaten	0 UMK	0	APBD Kabupaten	0 UMK	0	APBD Kabupaten	0 UMK	455.217.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
						Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	0 Kali	0	DBHCHT	0 Kali	0	DBHCHT	8 Kali	120.000.000	DBHCHT	8 Kali	126.000.000	DBHCHT	8 Kali	132.300.000	DBHCHT	24 Kali	378.300.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					XV. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100 %	1.495.513.900		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	1.495.513.900	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					50. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi	41.544.800	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	41.544.800	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					51. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitas pembinaan	200 Kopwan/Kopkar/KSPPS	54.192.850	APBD Kabupaten	0 Kopwan/Kopkar/KSPPS	0	APBD Kabupaten	0 Kopwan/Kopkar/KSPPS	0	APBD Kabupaten	0 Kopwan/Kopkar/KSPPS	0	APBD Kabupaten	0 Kopwan/Kopkar/KSPPS	0	APBD Kabupaten	0 Kopwan/Kopkar/KSPPS	54.192.850	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					52. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	47 Jenis	700.000.000	DBHCHT	0 Jenis	0	DBHCHT	0 Jenis	0	DBHCHT	0 Jenis	0	DBHCHT	0 Jenis	0	DBHCHT	0 Jenis	700.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Gedung PLUT-KUMKM
					53. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	415.058.200	APBD Kabupaten	0 UMKM	0	APBD Kabupaten	0 UMKM	0	APBD Kabupaten	0 UMKM	0	APBD Kabupaten	0 UMKM	0	APBD Kabupaten	0 UMKM	415.058.200	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					54. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM yang dipamerkan di Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	5 KUMKM	103.600.000	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	103.600.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					55. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	150 Orang	165.000.000	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	0	DBHCHT	0 Orang	165.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					56. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi anggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	35 Koperasi	16.118.050	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	0 Koperasi	16.118.050	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
					XVI. Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	100 %	614.655.372		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	0		0 %	614.655.372	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
					57. Kegiatan Pendukung Pelayanan	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	125 KUMKM	614.655.372	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	0	APBD Kabupaten	0 KUMKM	614.655.372	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Kabupaten Malang
T O T A L							TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 16 KEGIATAN : 57	5.034.316.372		4.658.644.000			6.497.092.300			6.841.058.155			7.707.076.850		21.045.227.305				



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : SANUSI

Jabatan : Wakil Bupati Malang

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2019



Pihak Pertama,

Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

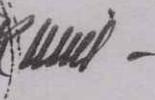
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7 %
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05 %

Program	Anggaran	Ket
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 943.044.350,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 233.513.050,00	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 7.800.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 22.280.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 661.530.700,00	APBD/DAK
6. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 235.726.000,00	APBD
7. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Rp 127.000.000,00	APBD
8. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 330.000.000,00	APBD
9. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 146.723.100,00	APBD
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri	Rp 2.425.000.000,00	DBHCT
Jumlah	Rp 5.132.617.200,00	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, Januari 2019


WAKIL BUPATI MALANG
SANUSI

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG

Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Makanan dan Minuman</p>	<p>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</p> <p>Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)</p> <p>Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)</p> <p>Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)</p> <p>Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)</p> <p>Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)</p> <p>Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)</p> <p>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)</p> <p>Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)</p> <p>Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)</p>	<p>100%</p> <p>4.500 buah</p> <p>12 Bulan</p> <p>347 OB</p> <p>61 Jenis</p> <p>12 Jenis</p> <p>10 Jenis</p> <p>1 Jenis</p> <p>1 Jenis</p> <p>3903 HOK</p>	<p>903.294.350,00</p> <p>2.830.000,00</p> <p>66.000.000,00</p> <p>465.451.200,00</p> <p>83.875.650,00</p> <p>58.829.000,00</p> <p>6.417.200,00</p> <p>2.400.000,00</p> <p>1.872.000,00</p> <p>33.659.300,00</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	235.726.000,00
					Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produksinya	40 Kop	49.992.000,00
					Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	70 Kop/UMK	125.000.000,00
					Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produksinya melalui inkubator bisnis dan teknologi	100 Kop	60.734.000,00
				Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	146.723.100,00
					Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitas jaringan kerjasama antar koperasi	97 Kop	45.217.300,00
					Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	110 Kop	61.504.000,00
					Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Kop	40.001.800,00
				Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha		Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	177.000.000,00
					Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah kecamatan yang dipetakan produk unggulan	11 Kecamatan	25.000.000,00
					Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	500 Orang	152.000.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.800.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	17 Orang	7.800.000,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	22.280.000,00
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	1 Buku	16.970.000,00
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	5.310.000,00
		Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7%	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	661.530.700,00
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi Perkoperasian	168 Orang	470.000.000,00
					Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi anggota Koperasi	100 Orang	133.985.300,00
					Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah pembinaan koperasi berprestasi	5 Kop	
						Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan SDM Koperasi	50 Kop	57.545.400,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	235.726.000,00
					Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produksinya	40 Kop	49.992.000,00
					Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	70 Kop/UMK	125.000.000,00
					Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produksinya melalui inkubator bisnis dan teknologi	100 Kop	60.734.000,00
				Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	146.723.100,00
					Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitas jaringan kerjasama antar koperasi	97 Kop	45.217.300,00
					Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	110 Kop	61.504.000,00
					Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Kop	40.001.800,00
				Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha		Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	177.000.000,00
					Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah kecamatan yang dipetakan produk unggulan	11 Kecamatan	25.000.000,00
					Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	500 Orang	152.000.000,00

SARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	2.425.000.000,00	
				Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri dan masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 orang	1.409.280.000,00	
					Jumlah pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	7 Kali	1.015.720.000,00	
					Jumlah promosi melalui media cetak dan elektronik	1 Kali		
			Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	392.246.463,43	
				Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	125 KUMKM	392.246.463,43	
TOTAL JUMLAH								5.244.863.663,43

Malang, September 2019
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681207 198803 2 002

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	2,7%	2,66%	101,4%
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	0,05%	0,14%	280%

Malang, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI

Pembina Utama Muda

NIP. 19681207 198803 2 002